

Nama : RIFKI YUPRIZA
NPM : 231212 9010 P
Mata Kuliah : Akuntansi Publik

Resume Bab I Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik

Pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

Secara kelembagaan, domain publik antara lain: badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah) BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik, LSM, Universitas dan Organisasi nirlaba lainnya.

Istilah "Sektor Publik" sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya: layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya: fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta.

Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dimana hasil tersebut harus memiliki manfaat. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik dengan sektor swasta disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur dan demografi.

Value For Money

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu:



1. Efisiensi: Perolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah
2. Efisiensi: Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu
3. Efektivitas: Tingkat pencapaian hasil program dengan tepat target yang ditetapkan dibandingkan secara bersamaan atau perbandingan outcome dengan output.

Ketiga hal tersebut diatas merupakan pokok value for money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu:

- a. Equity (Keadilan) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi.
- b. Equality (Pemerataan) penggunaan yang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata.

Manfaat Implementasi value for money:

1. Meningkatkan pelayanan publik
2. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai aktor pelaksanaan akuntabilitas publik.

Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Swasta.

Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Swasta
Tujuan Organisasi	Non profit motive	Profit Motive
Sumber Pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN / BUMD, penjualan aset negara dsb	Pembiayaan Internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan Eksternal: Utang bank, obligasi, penawaran saham
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku dan hierarkis	Flaksibel, datar, piramid, lintas fungsional dsb
Karakteristik Anggaran	Terbuka Untuk Umum	Tertutup untuk publik
Sistem Akuntansi	Cash Accounting	Accrual Accounting

Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta yaitu:

1. Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi



2. Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif.
3. Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan.
4. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan suatu produk yang sama separti: Transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi dsb.
5. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (Accountability).

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik:

- Istilah sektor publik dipakai pertama kali pada tahun 1952
- Pada tahun 1970-an, muncul kritikan dan serangan yang mempertanyakan peran sektor publik
- Tahun 1980-an reformasi sektor publik di negara-negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan
- Pemerintah New Zealand yang dianggap paling maju dan sukses dalam merapkan akuntansi berbasis akrual sejak tahun 1991.
- Akuntansi sektor publik berkembang pesat dalam dua dasawarsa terakhir.

Akuntansi Sektor Publik dan Good Governance

Untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan (Institutional Reform) dan reformasi manajemen publik. Selain reformasi tersebut, untuk mendukung terciptanya good governance, maka diperlukan serangkaian re-



Reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu

1. Reformasi Sistem Penganggaran
2. Reformasi Sistem Akuntansi
3. Reformasi Sistem Pemertasaan
4. Reformasi Sistem Manajemen

Akuntabilitas Publik

Adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal
2. Akuntabilitas Horizontal

Privatisasi

merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik

Otonomi Daerah

Secara teoritis, desentralisasi akan menghasilkan 2 manfaat yaitu:

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasilnya.
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap